

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian



**Gambar 1.1 Logo Kota Tangerang**

*Sumber: tangerangkota.go.id*

Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten, dan menjadi salah satu kota terbesar yang berada di Provinsi Banten, sedangkan untuk di wilayah Jabodetabek terbesar ketiga setelah Jakarta dan Bekasi. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kota Tangerang berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebanyak 2.185.304 jiwa. Penyebaran penduduk tersebut terbagi di 13 Kecamatan yang ada, diantaranya Kecamatan Ciledug (198.448), Kecamatan Larangan (203.644), Kecamatan Karangtengah (142.512), Kecamatan Cipondoh (316.516), Kecamatan Pinang (210.086), Kecamatan Tangerang (182.794), Kecamatan Karawaci (180.396), Kecamatan Jatiuwung (124.492), Kecamatan Cibodas (154.765), Kecamatan Periuk (148.829), Kecamatan Batuceper (102.539), Kecamatan Neglasari (118.000), dan Kecamatan Benda (102.283). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cipondoh (316.516) dan Kecamatan Benda menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil di Kota Tangerang (BPS Kota Tangerang, 2018).

Memiliki wilayah sebanyak 13 Kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai 2.185.304 jiwa, dimana jumlah penduduk tersebut terdiri atas penduduk

dengan umur 0-70 tahun baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.114.613 jiwa sedangkan, jumlah penduduk perempuan mencapai 1.070.691 jiwa (BPS Kota Tangerang, 2018). Berikut merupakan data jumlah penduduk berdasarkan hasil pengelompokan umur dan jenis kelamin di Kota Tangerang tahun 2018, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, 2018**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
0-4	104.289	100.583	204.872	9,37%
05-09	95.680	92.406	188.086	8,61%
10-14	76.198	73.562	149.760	6,85%
15-19	80.890	82.836	163.726	7,49%
20-24	103.259	98.223	201.482	9,22%
25-29	115.574	110.924	226.498	10,36%
30-34	113.791	107.997	221.788	10,15%
35-39	99.537	97.449	196.986	9,01%
40-44	87.800	85.469	173.269	7,93%
45-49	74.978	72.357	147.335	6,74%
50-54	60.873	56.763	117.636	5,38%
55-59	47.172	41.249	88.421	4,05%
60-64	26.799	21.424	48.223	2,21%
65-69	14.543	12.747	27.290	1,25%
70+	13.230	16.702	29.932	1,37%
<b>Total</b>	<b>1.114.613</b>	<b>1.070.691</b>	<b>2.185.304</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah, BPS Kota Tangerang, 2018.*

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa usia produktif merupakan usia yang dimiliki oleh penduduk dengan rentang 15-64 tahun. Sedangkan, untuk usia tidak produktif berada dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Berdasarkan Tabel 1.1 Kota

Tangerang memiliki jumlah penduduk sebesar 72,55% atau sebanyak 1.585.364 jiwa dengan rentang usia 15-64 tahun. Sedangkan, jumlah usia tidak produktif mencapai 27,45% atau sebesar 599.940 jiwa.

Berdasarkan praktiknya yang sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatakan bahwa ketentuan usia pensiun berdasarkan pada Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa batas usia pensiun adalah 55 tahun (Financial.bisnis.com, 2018). Selain itu, hal yang mengatakan bahwa usia pensiun berada di usia 55 tahun didukung dalam pasal 14 ayat 1 UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua akan dibayarkan kepada para karyawan yang telah mencapai usia 55 tahun. Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juga mengatakan bahwa hak atas manfaat dana pensiun dengan catatan bahwa batas usia pensiun normal berada di usia 55 tahun (Gajimu.com, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini menetapkan bahwa usia produktif berada di 15-55 tahun yang mana berdasarkan BPS Kota Tangerang untuk rentang usia 15-55 tahun berjumlah 1.448.720 jiwa atau sebesar 66,28% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Manusia selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam hidupnya, salah satu permasalahan yang terjadi yaitu mengenai kesulitan keuangan. Penyebab permasalahan mengenai keuangan di dasari oleh faktor kurangnya pendapatan yang diterima oleh manusia tersebut, sehingga dikatakan manusia tersebut berada pada lingkaran kemiskinan. Permasalahan mengenai kemiskinan masih menjadi hal utama dalam pembangunan perekonomian di negara berkembang seperti halnya di Indonesia (Clara & Krisnawati, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menjadi sorotan pemerintah Indonesia, segala upaya dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%), angka tersebut mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 26,58 juta orang (10,12%) (BPS, 2018). Terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, pengendalian inflasi dan nilai tukar rupiah petani yang semakin meningkat (Tribunnews.com, 2018).

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan dan inklusi keuangan. Menurut Gunarsih *et al.*, (2018) inklusi keuangan dipercaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Habibullah (2019), inklusi keuangan mampu membantu masyarakat miskin untuk ikut serta dalam kegiatan dan membantu pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Inklusi keuangan memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat miskin dan lembaga keuangan formal sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia (Putri, 2019). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) yang mengatakan bahwa untuk mengurangi potensi kesenjangan ekonomi dan mendukung program pengurangan kemiskinan dapat didukung dengan adanya inklusi keuangan yang baik (Economy.okezone.com, 2016).

Inklusi keuangan harus berjalan bersamaan dengan literasi keuangan (swara.tunaiku.com, 2019). Dengan adanya literasi keuangan mampu mendorong dalam meningkatkan inklusi keuangan. Apabila inklusi keuangan tidak disertai dengan tingkat pengetahuan keuangan (literasi keuangan) akan memunculkan permasalahan baru di sektor finansial karena masyarakat mengalami kebingungan informasi terkait keuangan tersebut. Peningkatan literasi keuangan bersamaan dengan komitmen perlindungan konsumen akan berpotensi untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa. Masyarakat yang memahami terkait bagaimana cara untuk mengelola keuangan yang baik, akan mampu mendorong untuk keluar dari permasalahan kemiskinan (Clara & Krisnawati, 2020).

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengelola keuangannya (Nujmatul, 2016). Menurut Yushita (2017), literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh

setiap orang, agar terhindar dari masalah keuangan. Literasi Keuangan merupakan keyakinan, keterampilan dan pengetahuan yang memengaruhi perilaku dan sikap untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Berdasarkan hasil Survei Nasional dan Literasi Keuangan (SNLIK 2019) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03%, angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK 2016 yang hanya mencapai 29,70%.

Dalam tiga tahun terakhir peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat mencapai 8,33%. Dari data SNLIK 2019 pemahaman keuangan masyarakat sebesar 38,03% disebut *well literate* (21,84%) yang artinya dari 100 penduduk hanya 38 orang yang mengetahui dan memiliki keyakinan terkait lembaga dan produk jasa keuangan, seperti fitur, risiko dan manfaat, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan (SNLIK, 2019). Hanya terdapat 13 Provinsi saja yang memiliki indeks literasi keuangan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai seluk beluk keuangan tidak merata pada seluruh Provinsi, berikut indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia:



**Gambar 1.2 Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia pada Tahun 2016 Berdasarkan Provinsi**

*Sumber: OJK-RI, 2017*

Pada Gambar 1.2 dapat disimpulkan, 3 provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi keuangan yang cukup tinggi yaitu posisi pertama ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta (40,00%), disusul oleh DI Yogyakarta (38,50%) dan yang ketiga yaitu Provinsi Banten (38,20%). Dimana indeks literasi keuangan di Provinsi Banten tersebut berada di dua wilayah yaitu Tangerang dengan indeks mencapai 40,9% dan Serang mencapai 35,5% (OJK-RI, 2017).

Perbankan memiliki indeks literasi keuangan masyarakat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri keuangan lainnya yaitu mencapai 21,80% (2013) dan 28,90% (2016). Sedangkan, untuk pasar modal indeks literasi keuangannya mengalami peningkatan dari 3,79% (2013) menjadi 4,40% (2016) tetapi jika dibandingkan dengan industri keuangan lainnya, pasar modal masih memiliki jumlah yang lebih rendah. Sedangkan, tingkat indeks literasi keuangan sektor Asuransi yang pada tahun 2013 mencapai 17,8%, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 15,8%. Penurunan terjadi akibat adanya perluasan survei wilayah sampai ke pelosok daerah yang ada di Indonesia dan adanya persepsi yang mengatakan bahwa asuransi hanya untuk orang-orang yang telah memahami risiko. Berikut indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan sektor jasa keuangan tahun 2013 dan 2016:



**Gambar 1.3 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2013 dan 2016**

*Sumber: OJK-RI, 2017*

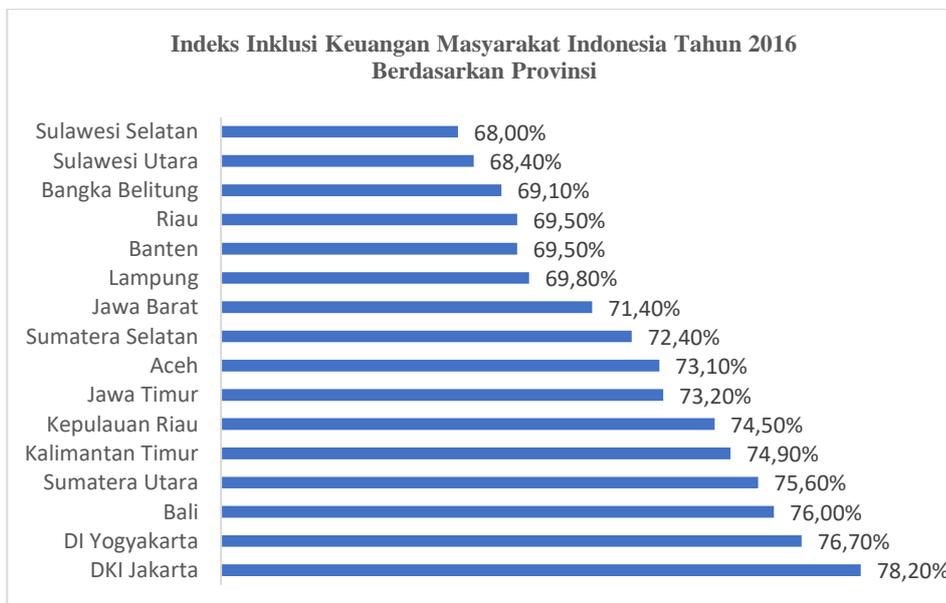
Berdasarkan survei 2016, literasi keuangan melakukan pemetaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Berdasarkan hasil pemetaan literasi keuangan menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tidak termasuk dalam bagian perhitungan indeks literasi keuangan dengan mempertimbangkan bahwa keduanya bersifat wajib (OJK-RI, 2017). Berdasarkan Gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa sektor jasa keuangan masih belum merata, hal ini membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah.

Salah satu bentuk rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah rendahnya minat menabung. Rendahnya budaya menabung masyarakat Indonesia dikarenakan pola konsumtif masyarakat yang tinggi (Aviliani, 2017). Survei *Huffington Post* menunjukkan bahwa milenial Asia lebih sering makan di luar rumah (71,4%) dan hura-hura (bioskop, konser, dugem) (26,5%). Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat usia muda tidak peduli lagi mana kebutuhan utama, kebutuhan tambahan dan mana kebutuhan untuk senang-senang (Debora, 2017). Kebanyakan orang melakukan pembelian segala hal yang dianggap paling mahal hanya untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik semata, tanpa peduli dengan harga yang telah dikeluarkannya hal tersebut dapat mengakibatkan orang tersebut menjadi boros atau perilaku konsumtif (Wahyudi, 2013). Mayoritas usia muda memiliki tingkat literasi yang rendah karena dalam rentang usia tersebut masih berada ditahap awal dalam kehidupan finansial. Pada tahap ini mereka memiliki masalah mengenai pengetahuan keuangan yang minim, sehingga sebagian besar dari pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi dibandingkan untuk berinvestasi (Chen & Ronald, 1998).

Menurut Bongomin *et al.*, (2016) jika seseorang telah paham atau mengetahui tentang keuangan maka orang tersebut sadar akan pentingnya manfaat dan penggunaan jasa dari industri keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan terdapat keterkaitan dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), 2016). Menurut Bank Dunia inklusi keuangan memiliki arti bahwa setiap individu atau bisnis yang memiliki akses untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang berkelanjutan dan efektif. Inklusi keuangan itu sendiri menunjukkan keadaan seseorang dalam memiliki dan menggunakan berbagai produk atau jasa keuangan seperti *mobile banking*, uang elektronik, tabungan digital, *SMS banking* dan layanan asuransi (Kumparan.com, 2019).

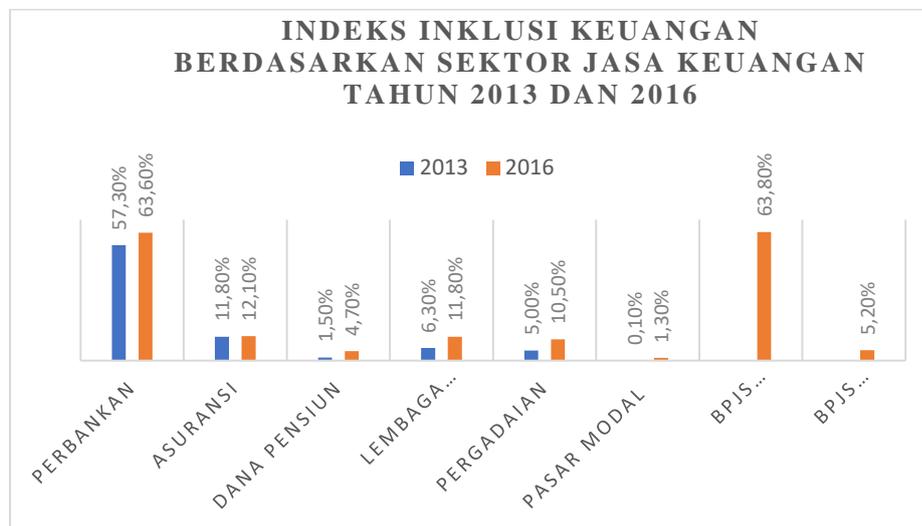
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Masyarakat di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan mencapai 59,7% pada tahun 2013 yang artinya masyarakat telah memiliki akses terhadap lembaga jasa keuangan formal. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8,1% menjadi 67,8%. Sedangkan, hasil SNLKI 2019 mengatakan bahwa inklusi keuangan mengalami peningkatan hingga mencapai 76,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut merupakan indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2016 berdasarkan Provinsi:



**Gambar 1.4 Indeks Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia pada Tahun 2016 Berdasarkan Provinsi**

*Sumber: OJK-RI, 2017*

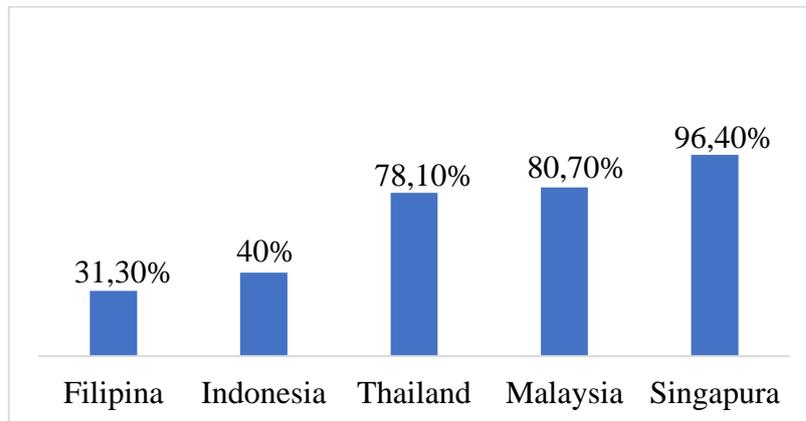
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2016 menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) 2013, dimana indeks inklusi keuangan secara komposisi (konvensional dan syariah) lebih tinggi dari indeks literasi keuangan. Demikian dengan sektor perbankan masih memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan lainnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga masih belum merata di setiap Provinsi. Berikut merupakan indeks inklusi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan tahun 2013 dan 2016:



**Gambar 1.5 Indeks Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2013 dan 2016**

*Sumber: OJK-RI, 2017*

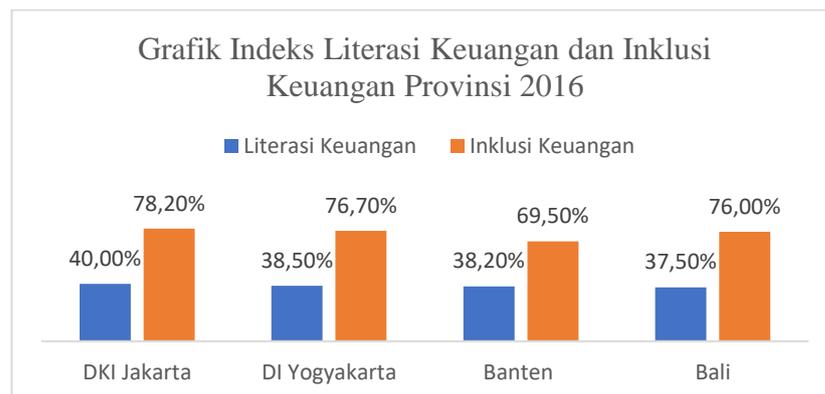
Minimnya tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia menduduki peringkat keempat terbawah sebagai negara yang memiliki indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan yang rendah se-ASEAN. Berikut merupakan data kegiatan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) OJK Tahun 2015-2019:



**Gambar 1.6 Grafik Akses Masyarakat Terhadap Keuangan Formal**

(Sumber: data diolah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Dilihat dari Gambar 1.6, Indonesia termasuk negara ASEAN yang memiliki tingkat pemahaman mengenai keuangan formal yang masih rendah yaitu hanya sebesar 40% dibandingkan dengan empat negara lainnya. Indonesia menduduki peringkat ke empat, setelah Thailand (78,10%), Malaysia (80,70%), Singapura (96,40%) sedangkan peringkat ke lima terdapat Filipina (31,30%). Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait keuangan formal karena masih mengandalkan lembaga *non*-keuangan.



**Gambar 1.7 Grafik Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Provinsi 2016**

(Sumber: data diolah, OJK-RI, 2017)

Berdasarkan Gambar 1.7 dapat terlihat Provinsi dengan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan terbaik di Indonesia. Pada Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa Provinsi dengan tingkat literasi keuangan terbaik berada di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Sedangkan, pada Gambar 1.4 Provinsi yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik berada di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali dan Sumatera Utara. Berdasarkan grafik indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan berdasarkan Provinsi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali masih memiliki indeks yang baik, sedangkan untuk Provinsi Banten indeks inklusi keuangan masih jauh di bandingkan dengan 3 Provinsi tersebut. Dengan masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di Provinsi Banten, membuat Provinsi tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut Gunarsih *et al.*, (2018) inklusi keuangan dipercaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Kemiskinan biasanya dipandang sebagai keadaan yang dialami oleh seseorang maupun keluarga berdasarkan kurangnya ekonomi (Fajriawati, 2016). Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, dari 2 juta penduduk yang ada di Kota Tangerang, terdapat 68.770 keluarga yang masih termasuk dalam angka kemiskinan (Fauzi, 2019). Meskipun Kota Tangerang terdapat Bandara Internasional Soekarno-Hatta namun tidak banyak membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Tangerang. Dengan adanya bandara tersebut memang memberikan pemasukan, namun hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, dan masih sedikit dampak langsung yang dirasakan kepada masyarakat sekitar (Adji, 2019). Pemerintah Kota Tangerang terus berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan terkait kemiskinan berasal dari aspek-aspek yang berbeda diantaranya Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Berikut merupakan presentase penduduk miskin di Kota Tangerang:

**Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan
1.	Pandeglang	116,16	9,61	310.859
2.	Lebak	108,82	8,41	283.901
3.	Tangerang	190,05	5,18	451.325
4.	Serang	64,46	4,30	294.829
5.	Kota Tangerang	103,49	4,76	556.782
6.	Kota Cilegon	13,49	3,25	428.867
7.	Kota Serang	36,21	5,36	350.237
8.	Kota Tangsel	28,21	1,68	549.150
	Banten	661,36	5,24	431.069

*Sumber: Hidayat et al., 2018*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat, setelah Kabupaten Tangerang (190,05), Pandeglang (116,16), dan Lebak (108,82). Meskipun Kota Tangerang memiliki angka garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten yaitu sebesar 556.782, belum mampu terhindar dari permasalahan kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Tangerang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Garis miskin merupakan suatu hasil penjumlahan yang berasal dari Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (BPS Kota Tangerang, 2018). Berikut merupakan gambaran terkait indikator kemiskinan di Kota Tangerang:

**Tabel 1.3 Indikator Kemiskinan Kota Tangerang 2016-2018**

Uraian	Indikator Kemiskinan Kota Tangerang		
	2018	2017	2016
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	556.782,00	508.551,00	496.349,00
Jumlah Penduduk Miskin	103.490,00	105.340,00	102.880,00

Persentase Penduduk Miskin	4,76	4,95	4,94
----------------------------	------	------	------

*Sumber: tangerangkota.bps.go.id, 2018*

Beberapa program dan kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Tangerang, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Tangerang. Program yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dari pemerintah pusat diantaranya Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (PNPM Mandiri Perkotaa, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri usaha mina perdesaan, PNPM Mandiri Pariwisata; PNPM Mandiri PUAP, PNPM Mandiri Integrasi), Program perlindungan sosial berbasis keluarga (BOS, PKH, RASKIN, BSM, JAMKESMAS, JAMPERSAL, BOK, BLSM), Program pemberdayaan UMKM-K (KUR, CSR, KUBE), Program serba murah (angkutan murah, rumah murah, dan rumah tidak layak huni). Sedangkan, program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai Perda Nomor 7 tahun 2012 antara lain Strategi Perlindungan Sosial, Strategi Perluasan Kesempatan Pemenuhan Hak Dasar, Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi, Strategi Kemitraan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut sangat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kota Tangerang, ditambah lagi dengan tingkat inklusi masyarakat Kota Tangerang yang baik akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Fadilla, 2017).

Penduduk yang mendominasi Kota Tangerang dengan rentang usia 15-55 tahun sebanyak 1.448.720 (BPS Kota Tangerang, 2018). Kota Tangerang sendiri merupakan pusat manufaktur dan industri di pulau Jawa dan memiliki lebih dari 1000 pabrik (banten.bpk.go.id). Dengan memiliki jumlah pabrik yang banyak, membuat Kota Tangerang menjadi tujuan para pendatang terutama khususnya usia produktif untuk melangsungkan hidupnya. Pada tahun 2018 Disdukcapil mencatat dalam sehari terdapat 100 sampai 120 orang pendatang di Kota Tangerang (Roudhoh, 2018). Faktor lain yang mampu untuk mempercepat penurunan angka

kemiskinan adalah masyarakat usia produktif. Masyarakat usia produktif dan program inklusi ketika dikombinasikan akan menjadi sangat menarik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebelumnya OJK memiliki target untuk berfokus kepada ibu rumah tangga dan UMKM, namun pada saat ini OJK membidik usia produktif dengan melaksanakan berbagai program edukasi keuangan yang menyeluruh di berbagai pelosok dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan (Clara & Krisnawati, 2020).

Beberapa kelompok yang termasuk ke dalam sasaran utama kegiatan literasi keuangan adalah Pelajar/Mahasiswa, Pemuda, Petani, Nelayan, Profesi, Penyandang disabilitas, Pensiunan, Perempuan dan UMKM (OJK-RI, 2017). Berdasarkan kelompok yang sudah disebutkan, maka disimpulkan bahwa kelompok usia produktif menjadi sasaran utama untuk meningkatkan literasi keuangan. Sebagian besar sasaran edukasi untuk peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia adalah masyarakat usia produktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan alasan mengenai edukasi keuangan ke kalangan muda karena diharapkan dapat membantu pembentukan kebiasaan pengelolaan uang sedari dini. Oleh karena itu, masyarakat usia produktif menjadi perhatian khusus bagi peneliti karena akan menanggung masyarakat yang berusia belum produktif serta masyarakat yang tidak produktif lagi. Maka dari itu, kelompok usia produktif di Kota Tangerang sudah sepatutnya dijadikan objek penelitian untuk membantu upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat diseluruh pelosok Indonesia guna mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (OJK-RI, 2017). Beragam kegiatan untuk memberikan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK Bersama jasa keuangan. Edukasi keuangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kuliah umum, edukasi bahari, edukasi komunitas, iklan layanan masyarakat, *edu expo*, *training of*

*trainer, outreach program*, wayangan, SiMOLEK dan bioskop keliling dengan target edukasi yaitu para masyarakat dengan kategori usia produktif (Yoga, 2017).

Dalam pelaksanaan program inklusi keuangan dilaksanakan dengan melalui program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro maupun melalui pengembangan produk mikro, seperti yuk nabung saham, nabung emas, tabungan SimPel, asuransi mikro, dan reksadana mikro telah direalisasikan (Askrida.com, 2017). Dalam meningkatkan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan Bersama dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Gerakan Nasional Menabung, Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan Untuk Rakyat, program penyaluran bansos secara non tunai dan pengembangan Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat (Siaran Pers OJK, 2017). Berdasarkan program-program yang telah direncanakan bahkan telah dilaksanakan belum memiliki dampak yang signifikan, karena tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih berada di urutan bawah jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN lainnya.

Modal sosial merupakan budaya internal masyarakat dan koherensi sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang ada diantara pihak masyarakat dan pihak lembaga terkait dimana mereka berada (Kamukama & Natamba, 2013). Modal sosial juga memiliki peran penting untuk memediasi dan meningkatkan berbagai sumber daya termasuk pengetahuan dan keterampilan untuk memahami literasi keuangan (Bongomin *et al.*, 2016). Pada saat ini untuk mengembangkan modal sosial terdapat komunitas *online* seperti kaskus forum. Salah satu bentuk topik yang dibahas adalah forum mengenai perencanaan keuangan dari NgaturDuit.com, yang mana tujuan dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia (Ilmahaq, 2020).

Kota Tangerang memiliki modal sosial untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang bekerjasama dengan pihak OJK yang bernama Galeri Literasi. Dimana kegiatan yang ada dalam Galeri Literasi seperti memberikan penyuluhan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Sikapuangmu.ojk.go.id, 2015). Selain itu, di Kota Tangerang itu sendiri memiliki komunitas AOKlandz, dimana komunitas tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan

di kalangan akademis, yang bermaksud untuk memberikan pemahaman mengenai investasi di pasar modal Indonesia (Aoklandz.com, 2017). Untuk memutus mata rantai literasi keuangan yang rendah, Kota Tangerang menjadi salah satu kota yang membuka kelas *Money Savvy* (kelas *financial planning*) dan *Stock Savvy* (kelas saham) yang ada di *Big Alpha* (Fatmayanti, 2020).

Kota Tangerang termasuk dalam salah satu kota yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bank Danamon dengan nama “Danamon Peduli”, dimana kegiatan tersebut menjadi tempat untuk menimba ilmu melalui kegiatan “Pojok BISA” merupakan kelas literasi keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait perencanaan keuangan bagi para pedagang dan masyarakat terutama ibu rumah tangga (Herry, 2015). Berdasarkan program tersebut, dapat dilihat untuk sarannya masih beragam dan tidak terspesifik, maka menurut penulis sasaran modal sosial tersebut dapat dispesifikan untuk kelompok usia produktif. Oleh karena itu, perlu ada nya perhatian khusus terhadap masyarakat usia produktif, karena pada nantinya mereka lah yang akan menanggung usia yang belum produktif maupun usia yang sudah tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan, peran modal sosial dapat dijadikan sebagai mediator yang baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keuangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Bongomin *et al.*, 2016), modal sosial berperan penting dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, terutama dalam mengakses layanan keuangan di masyarakat. Penelitian terdahulu mengenai modal sosial dalam kaitannya dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah penelitian dari Saputra & Dewi (2017) yang mengatakan bahwa peran modal sosial signifikan sebagai mediator antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Modal sosial memiliki peran secara parsial dalam memediasi hubungan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di Kabupaten Gunung Kidul dengan objek usia produktif (Clara & Krisnawati, 2020). Penelitian lainnya dilakukan oleh (Bongomin *et al.*, 2016) dengan hasil bahwa modal sosial pada masyarakat di Uganda merupakan mediator yang berperan penting dalam hubungan antara literasi keuangan dan

inklusi keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disampaikan menjadi dasar dalam penelitian ini.

Dengan demikian penulis berharap peran modal sosial dapat menjadi sarana mediasi untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada masyarakat usia produktif di Kota Tangerang, terutama penduduk berusia produktif guna mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Tangerang. Berdasarkan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Modal Sosial sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Usia Produktif di Kota Tangerang”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Permasalahan mengenai kemiskinan masih menjadi hal utama dalam pembangunan perekonomian di negara berkembang seperti halnya di Indonesia (Clara & Krisnawati, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menjadi sorotan pemerintah Indonesia, segala upaya dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan inklusi keuangan. Meningkatkan inklusi keuangan harus dibarengi oleh tingkat literasi keuangan yang baik. Minimnya tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia menduduki peringkat keempat terbawah sebagai negara yang memiliki indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan yang rendah se-ASEAN. Dari data SNLIK 2019 pemahaman keuangan masyarakat sebesar 38,03%, dimana angka tersebut dikategorikan sebagai *well literate* (21,84%) yang artinya dari 100 penduduk hanya 38 orang yang mengetahui dan memiliki keyakinan terkait lembaga dan produk jasa keuangan, seperti fitur, risiko dan manfaat, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keahlian untuk menggunakan produk dan jasa keuangan (SNLKI, 2019).

Dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat diharapkan peran modal sosial menjadi mediator, sehingga mampu untuk membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya pada usia produktif di Kota Tangerang. Dengan adanya literasi keuangan

dan inklusi keuangan diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kota Tangerang. Peneliti terdahulu yang membahas mengenai modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan belum ada yang menjadikan Kota Tangerang sebagai studi kasus. Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang dari penelitian ini, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti:

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal sosial?
2. Apakah modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan?
3. Bagaimana pengaruh modal sosial dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal sosial
2. Untuk mengetahui apakah modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal sosial dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pihak yang membutuhkan maupun pihak yang terkait. Adapun manfaat tersebut diantaranya:

##### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pembaca khususnya di bidang *financial behavior* yang membutuhkan informasi terkait modal sosial terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

#### **1. Bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan program-program dimasa mendatang terkait peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

#### **2. Bagi masyarakat usia produktif**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat usia produktif di Kota Tangerang mengenai peran modal sosial sebagai mediator, dan menambah pengetahuan mengenai literasi keuangan, sehingga dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdapat sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan yang ada. Secara garis besar sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara lain:

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan tugas akhir.

#### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Pada bab dua ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dari penelitian ini, teori-teori atau literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian, hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian.

#### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel dan skala pengukuran variabel penelitian, uji validitas dan realibilitas, analisis data, dan pengujian hipotesis.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat ini dijelaskan mengenai hasil dari uji validitas, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan untuk permasalahan yang sudah dirumuskan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab lima atau bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari masalah yang ada serta saran yang diharapkan oleh peneliti dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.